

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakah sistem perencanaan anggaran pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya?
2. Pihak – pihak manakah yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran?
3. Apakah proses penganggaran melibatkan masyarakat? Melalui media apa?
4. Terdiri dari badan apakah atau Satuan Tiga selaku tim anggaran?
5. Lebih ke arah manakah fokus peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dalam proses perencanaan anggaran?
6. Lebih ke arah manakah fokus peran dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam proses perencanaan anggaran?
7. Lebih ke arah manakah fokus peran dari Bagian Bina Program Kota Surabaya dalam proses perencanaan anggaran?
8. Adakah waktu penentuan untuk proses perencanaan anggaran? Apabila ada biasanya terdapat pada bulan apa?
9. Adakah waktu penentuan untuk proses perubahan anggaran keuangan? Apabila ada biasanya pada bulan apa?
10. Adakah proses evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh tim anggaran selaku satuan tiga? Setiap berapa bulan sekali terdapat proses tersebut?
11. Menurut Bapak/ Ibu faktor – faktor apakah yang menyebabkan perubahan anggaran keuangan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya?
12. Dari faktor – faktor tersebut, faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi perubahan anggaran pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya?
13. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai realisasi anggaran pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya yang paling rendah diantara SKPD lain, namun perubahan anggaran keuangan pada dinas tersebut paling besar?
14. Berapa kali dalam satu tahun biasanya perubahan anggaran keuangan dilakukan?

LAMPIRAN 2

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 - 4 Telp. (031) 5473284, Fax. 5343000
 SURABAYA (60272)

Surabaya, 24 Nopember 2014

Kepada

Yth. 1. Ketua DPRD Kota Surabaya
 2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya
 3. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya

di -
SURABAYA

Nomor : 070 / 1762 / 436.7.3 / 2014
 Lampiran :
 Hal : Penelitian

REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : 3228/UN3.1.7/PPd/2014 hal Ijin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : Nesya Windia Putri
 b. Alamat : Jl. Gunung Anyar Harapan ZG - 31 Surabaya
 c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 d. Instansi/Organisasi : Universitas Airlangga Surabaya
 e. Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul / Thema : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)
 b. Tujuan : Penelitian
 c. Bidang Penelitian : Keuangan
 d. Penanggung Jawab: Dr. Faliq Suaedi, Drs., MM
 e. Anggota Peserta :
 f. Waktu : 3 (Tiga) Bulan, TMT Surat dikeluarkan
 g. Lokasi : DPRD, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.


Dengan persyaratan : 1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib menaati persyaratan / peraturan yang berlaku di Lokasi / Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan ;
 2. Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya ;
 3. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI ;
 4. Rekomendasi ini akan dicabut / tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan
 Sekretaris,
 Abdul Hakim, SH., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP 19520304 198703 1 017

Tembusan :
 Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya
 2. Saudara yang bersangkutan

LAMPIRAN 3



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 - 4 Telp. (031) 5473284, Fax. 5343000
 SURABAYA (60272)

Nomor : 070 / 11976 / 436.7.3 / 2014

Lampiran : -

Hai : Penelitian

Surabaya, | Desember 2014

Kepada

Yth. Kepala BAPPEKO Surabaya

di - SURABAYA

REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011.
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : 3226/UN3.1.7/PPd/2014 hal ljin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Nesya Windia Putri
- b. Alamat : Jl. Gunung Anyar Harapan ZG - 31 Surabaya
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Organisasi : Universitas Airlangga Surabaya
- e. Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul / Thema : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)
- b. Tujuan : Penelitian
- c. Bidang Penelitian : Keuangan
- d. Penanggung Jawab : Dr. Fali H Suedi, Drs., MM
- e. Anggota Peserta : -
- f. Waktu : 3 (Tiga) Bulan, TMT Surat dikeluarkan
- g. Lokasi : BAPPEKO

Dengan persyaratan :

1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mentaati persyaratan / peraturan yang berlaku di Lokasi / Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan.
2. Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang. Politik dan Linmas Kota Surabaya.
3. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI.
4. Rekomendasi ini akan dicabut / tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga Surabaya

2. Saudara yang bersangkutan



Abdul Hakim, SH., M.Si.
Pembin Tk. I
NIP 19620304 198703 1 017

LAMPIRAN 4

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jl. Jaks Agung Suprpto No. 2 - 4 Telp. (031) 5473284, Fax. 5343000
 SURABAYA (60272)

Surabaya, 4 Desember 2014

Kepada

Yth. 1. Kepala Bagian Bina Program Setkota
 Surabaya
 2. Kepala Bagian Hukum Setkota Surabaya
 di -
SURABAYA

Nomor : 070 / 12158 / 436.7.3 / 2014
 Lampiran : -
 Hal : Penelitian

REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : 3228/UN3.1.7/PPd/2014 hal ljin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : Nesya Windia Putri
 b. Alamat : Jl. Gunung Anyar Harapan ZG - 31 Surabaya
 c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 d. Instansi/Organisasi : Universitas Airlangga Surabaya
 e. Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul / Thema : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)
 b. Tujuan : Penelitian
 c. Bidang Penelitian : Keuangan
 d. Penanggung Jawab : Dr. Fali H Suedi, Drs., MM
 e. Anggota Peserta : -
 f. Waktu : 3 (Tiga) Bulan, TMT Surat dikeluarkan
 g. Lokasi : Bagian Bina Program, Bagian Hukum

Dengan persyaratan :

1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mematuhi persyaratan / peraturan yang berlaku di Lokasi / Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan ;
2. Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya ;
3. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI ;
4. Rekomendasi ini akan dicabut / tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA BADAN
 Sekretaris,

 Abdul Hakim, SH., M.Si.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19620304 198703 1 017

Tembusan :
 Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Airlangga Surabaya
 2. Saudara yang bersangkutan

LAMPIRAN 5

Program Kegiatan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tahun 2012

Sebelum dan Setelah Perubahan Anggaran Keuangan

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas – puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap	15	6,233,912,296	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas – puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap	15	6,466,421,366
	Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk	4			Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk	4	
Pengadaan tanah untuk bangunan sarana kesehatan	Pengadaan tanah dan atau bangunan untuk sarana kesehatan	3 lokasi	6,223,912,286	Pengadaan tanah untuk bangunan sarana kesehatan	Pengadaan tanah dan atau bangunan untuk sarana kesehatan	3 lokasi	6,466,421,366
Perumahan rakyat			19,500,980,181	Perumahan rakyat			20,571,994,580
Program perumahan dan pemukiman	Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni /KK	2785	8,995,569,074	Program perumahan dan pemukiman	Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni /KK	2785	9,664,584,876
	Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)	316			Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)	316	
	Rasio angka ketersediaan makam selama 5 tahun kedepan	0.26			Rasio angka ketersediaan makam selama 5 tahun kedepan	0.26	
Peningkatan pengelolaan rusun di Surabaya	Waktu pelaksanaan pengelolaan 9 lokasi	12 bulan	8,995,569,074	Peningkatan pengelolaan rusun di Surabaya	Waktu pelaksanaan pengelolaan 9 lokasi	12 bulan	9,664,584,876
Program pelayanan administrasi perkantoran			1,100,227,242	Program pelayanan administrasi perkantoran			1,103,721,942
Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	1,100,227,242	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	1,103,721,942
Program peningkatan sarana prasarana aparatur			9,405,183,865	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			9,803,687,764
Pengadaan tanah untuk	Lokasi tanah atau bangunan yang	4 lokasi	8,934,648,617	Pengadaan tanah untuk	Lokasi tanah atau bangunan yang	4 lokasi	9,333,152,516

prasarana perkantoran pemerintahan	dibebaskan untuk kantor pemerintahan			prasarana perkantoran pemerintahan	dibebaskan untuk kantor pemerintahan		
Penataan ruang			4,014,774,331	Penataan ruang			4,391,464,219
Program penataan ruang	Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang	35,64%	4,014,774,331	Program penataan ruang	Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang	35,64%	4,391,464,219
Pendataan dan penelitian terhadap BTKD	Jumlah pendataan dan penelitian terhadap BTKD	12 dokumen	205,675,157	Pendataan dan penelitian terhadap BTKD	Jumlah pendataan dan penelitian terhadap BTKD	12 dokumen	289,739,817
Pemetaan tanah IPT	Jumlah hasil dokumen pemetaan IPT	3 dokumen	1,805,249,194	Pemetaan tanah IPT	Jumlah hasil dokumen pemetaan IPT	3 dokumen	2,097,874,422
Lingkungan hidup			10,734,673,749	Lingkungan hidup			11,349,527,749
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Presentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	30,40%	10,734,673,749	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Presentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	30,40%	11,349,527,749
Pengadaan tanah atau bangunan untuk ruang terbuka hijau	Pengadaan tanah atau bangunan untuk RTH	2 lokasi	10,734,673,749	Pengadaan tanah atau bangunan untuk ruang terbuka hijau	Pengadaan tanah atau bangunan untuk RTH	2 lokasi	11,349,527,749
Pertanahan			4,459,026,805	Pertanahan			4,759,123,582
Sertifikasi tanah milik pemerintah kota	Jumlah aset pemkot yang tersertifikat	582	4,459,026,805	Sertifikasi tanah milik pemerintah kota	Jumlah aset pemkot yang tersertifikat	582	4,759,123,582
Pengelolaan aset tanah/ bangunan aset daerah	Pelaksanaan pengelolaan arsip tanah atau bangunan aset daerah	192	553,034,400	Pengelolaan aset tanah/ bangunan aset daerah	Pelaksanaan pengelolaan arsip tanah atau bangunan aset daerah	192	753,034,400
Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Lokasi tanah aset/ barang daerah yang bersertifikat	25 bidang	954,696,937	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Lokasi tanah aset/ barang daerah yang bersertifikat	25 bidang	1,374,509,470
Pengamanan aset pemerintah kota surabaya	Jumlah pengamanan aset pemerintah kota surabaya	3 jenis	2,951,295,468	Pengamanan aset pemerintah kota surabaya	Jumlah pengamanan aset pemerintah kota surabaya	3 jenis	2,631,579,712
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian			2,829,756,727	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian			3,231,345,106
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			2,829,756,727	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			3,231,345,106
Pendataan dan penelitian tentang ijin pemakaian tanah	Jumlah pendataan dan penelitian 47,4347 IPT yang dikelola	12 buku	563,903,821	Pendataan dan penelitian tentang ijin pemakaian tanah	Jumlah pendataan dan penelitian 47,4347 IPT yang dikelola	12 buku	965,492,200

Perdagangan			8,360,618,013	Perdagangan			9,685,636,933
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Peningkatan jumlah sentra baru PKL	5 sentra	8,360,618,013	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Peningkatan jumlah sentra baru PKL	5 sentra	9,685,636,933
Pengadaan tanah/ bangunan untuk sarana pendukung pengembangan ekonomi masyarakat di surabaya	Pengadaan tanah atau bangunan untuk sarana pendukung pengembangan ekonomi masyarakat surabaya	3 lokasi	8,360,618,013	Pengadaan tanah/ bangunan untuk sarana pendukung pengembangan ekonomi masyarakat di surabaya	Pengadaan tanah atau bangunan untuk sarana pendukung pengembangan ekonomi masyarakat surabaya	3 lokasi	9,685,636,933



LAMPIRAN 6



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA - SKPD)

DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

TAHUN ANGGARAN 2013

KODE	NAMA FORMULIR
DPPA - SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013				DPPA-SKPD	
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2013					
Urutan Pemerintahan		(1 04) Pemukiman Rakyat			
Organisasi		(1 04 0200) Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERUBAH (BERKURANG) (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.2	Hati Rekrutasi Daerah	35.300.000.000	35.300.000.000	0	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Lain	5.942.862.985	5.942.862.985	0	0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	41.242.862.985	41.242.862.985	0	0,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	41.242.862.985	41.242.862.985	0	0,00
2	Belanja Daerah				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai	7.112.848.383	7.381.149.574	268.303.191	3,77
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	7.112.848.383	7.381.149.574	268.303.191	3,77
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai	6.020.561.700	3.274.898.200	(2.745.663.500)	(45,60)
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	17.297.320.442	17.301.556.781	4.236.338	0,02
2.2.3	Belanja Modal	23.031.416.090	51.975.174.141	28.943.758.051	125,68
	Jumlah Belanja Langsung	46.348.298.232	72.554.629.122	26.205.330.890	56,54
	Jumlah Belanja Daerah	53.462.144.621	79.935.778.696	26.473.634.075	49,52
	SURPLUS (j DEFISIT)	(12.219.281.636)	(38.692.915.711)	(26.473.634.075)	216,65

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan						
NO	URAIAN	ALOKASI TRIWULAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6
1.	Pendapatan	7.535.370.881	14.810.398.955	7.535.370.881	11.361.722.698	41.242.862.985
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.778.211.997	2.845.138.554	1.778.211.587	976.587.826	7.381.149.574
2.2.	Belanja Langsung	8.116.978.291	18.549.497.156	11.632.948.960	33.055.204.785	72.554.629.122
Surabaya, Mengetahui, Sekretaris Daerah Kota Surabaya Dr. Hendro Gunawan, MPA Pembina Tk. I NIP. 19691230 198003 1 003						